



## **KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA**

### **NOTULEN RAPAT**

#### **Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020**

*Topik: Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa yang Akuntabel*

#### **1. Pelaksanaan**

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Agustus 2018

Waktu : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat 204

**2. Pimpinan Rapat** : Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PPN/Bappenas

#### **3. Peserta Rapat :**

1. Tenaga Ahli Madya, Deputy II, Kantor Staf Presiden
2. Biro Perencanaan, Kementerian Desa dan PDT
3. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa dan PDT
4. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Kementerian Dalam Negeri
5. World Vision Indonesia
6. Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro)
7. Sekretariat Open Government Indonesia

#### **4. Pembahasan Rapat**

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L
3. Tujuan dari Renaksi ini adalah mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat baik dalam proses perumusan kebijakan dan monitoring perencanaan pembangunan pada tingkat pemerintah desa.
4. Isu desa cukup dipantau ketat dari KSP bahkan secara khusus Kepala Staf Kepresidenan menerbitkan surat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan.

5. Aksi terkait partisipasi masyarakat desa ini juga terdapat dalam aksi stranas PK, namun OGI lebih melihat ke arah penguatan partisipasi pada musyawarah desa.
6. KSP juga telah mengeluarkan surat nomor B-10 tahun 2018 tentang Usulan Perbaikan Tata Cara Musyawarah Desa dan Perencanaan Desa. Surat tersebut berisi tentang:
  - a. Peserta musyawarah desa dilakukan rotasi
  - b. Melibatkan partisipasi warga berdasarkan kepesertaan dari latar belakang pekerjaan dan juga stakeholder terdampak dalam permasalahan utama desa (air bersih, akses jamban, listrik, dll)
  - c. Pemda menempatkan staf teknis di setiap musdes di seluruh desa
7. Pada tahun 2018, Kemendagri menyelenggarakan FGD perencanaan partisipatif di desa. FGD berkaitan dengan proses dan alur melakukan musdes dan musrenbang desa di BPD. Saat ini, dokumen RPJMdes belum sepenuhnya mengikuti alur penyusunan perencanaan. Pada tahun 2019, Kemendagri juga berencana melakukan bimtek untuk pembangunan partisipatif.
8. Terkait dengan percepatan pelaksanaan Permendagri 20, Kemendagri sudah bersurat kepada pemda untuk melakukan penyesuaian pada permendagri 20. harapannya 2019 proses perencanaan sudah menyesuaikan ketentuan terbaru, permendagri 20. Perencanaan pada tahun 2018 akan dilakukan piloting di 31 desa. 2019 fokus pada kapasitas provinsi dan kabupaten/kota untuk penguatan permendagri 20 bukan lagi ke desa.
9. Kemendes melalui anggaran 2018 telah melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap 3 provinsi dan sebanyak 74.910 orang, penyusunan NSPK, program inovasi desa di 434 kabupaten/ kota. selain itu ada komik desa, bentuk edukasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan desa.
10. Terkait dengan Renaksi OGI ini, Kemendes telah berkoordinasi dan sepakat untuk mendorong harmonisasi Permendes agar mendukung Permendagri 20/2018, yaitu dengan melakukan revisi Permendes 2/2015 yang secara paralel akan merevisi juga ketentuan pada Permendes 3/2015.
11. Tindaklanjut dari pertemuan ini adalah Kemendes akan melakukan alokasi anggaran dan perencanaan terkait dengan kegiatan OGI. Selain itu, terkait surat Kepala Staf Kepresidenan No.B-10 agar Kemendes dan Kemendagri

dapat menindaklanjuti ketentuan tersebut dalam dokumen strategis (peraturan/ SE/ panduan)

12. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dituangkan dalam template untuk Renaksi OGI 2018-2020.

Notula Rapat

Tities Eka A.

### Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa yang Akuntabel

Latar Belakang :

Proses perencanaan desa yang dilakukan melalui musyawarah merupakan proses awal penentuan arah pembangunan. Namun, tidak banyak masyarakat desa yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasinya. Padahal kemanfaatan dari proses partisipasi tersebut akan meningkatkan akuntabilitas program pemerintah.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa yang Akuntabel	1. Terlaksananya penguatan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan musyawarah desa yang partisipatif	1. Terlaksananya bimtek perencanaan partisipatif di 36 desa pada 3 provinsi (Maluku, Jawa Tengah dan Sumatera Barat) 2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2. Kantor Staf Presiden
	2. Tersedianya harmonisasi peraturan kementerian desa terkait dengan partisipasi masyarakat	3. Tersedianya Draft Rancangan Permendesa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 4. Tersedianya Draft Rancangan Permendesa tentang Pendampingan Desa	Kementerian Desa dan PDT	